**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Peberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Kotamobagumenyusun Rencana Kerja Dinas PMD Kota Kotamobagu tahun 2018.Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas PMD Kota Kotamobagu tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas PMD Kota Kotamobaguyaitu :

#### “Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa Untuk Terciptanya Masyarakat Sejahtera, Berbudaya Dan Berdaya Saing"

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi.Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan DesaKota Kotamobagu adalah :

1. Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
2. Meningkatkan dan memperkuat peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan
3. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang efektif efisien sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Mewujudkan Ketersediaan data base profil desa/kelurahan dalam Perencanaan Desa/Kelurahan
5. Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam dalam Pembangunan
6. Meningkatkan Lembaga Ekonomi Mikro Perdesaan
   1. **LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Kotamobagu Tahun 2018 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
    1. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Dinas PMD Kota Kotamobagu Tahun 2018 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018

.

Sedangkan tujuan :

1. Acuan Dinas PMD Kota Kotamobagu dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Kotamobagu tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas PMD Kota Kotamobagu selama Tahun 2018.
   1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

Renja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan dan tugas dan fungsi SKPD serta review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang tujuan dan sasaran serta Program dan Kegiatan Tahun 2018

BAB IV. PENUTUP

Berisi catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Rencana Kerja Dinas PMD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018 adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas PMD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) T.A 2018Dinas PMD Kota Kotamobagu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas PMD Kota Kotamobagu selama tahun 2016, Tahun Anggaran berjalan 2017 dan perkiraan target tahun 2018. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. *Penetapan Indikator Kinerja*

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

1. *Capaian Analisis Kinerja*

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

* ***Evaluasi Program Tahun 2017***

Anggaran Tahun 2017Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu sebesar **Rp. 1.943.179.200,-** dengan 8 (delapan) program dan 28(dua puluh delapan) kegiatan. Dengancapaian kinerja fisik sebesar 100%dan capaian kinerja keuangan sebesar 96,40%.

* ***Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2018***

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2018 dengan usulan sebesar Rp**.1.213.826.360**,-terurai dalam 5 (lima) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2017, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

**2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD**

**Adapun analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan DesaKota Kotamobagu adalah sesuai tabelberikut :**

**Tabel 2**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kota Kotamobagu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **SPM** | **IKK** | **Target Renstra SKPD** | | | | **Realisasi Capaian** | | **Proyeksi** | | **Capaian Analisis** |
| **Tahun 2016 (thn n-2)** | **Tahun 2017 (thn n-1)** | **Tahun 2018**  **(thn n)** | **Tahun 2019**  **(thn n+1)** | **Tahun 2016 (thn n-2)** | **Tahun 2017 (thn n-1)** | **Tahun 2018**  **(thn n)** | **Tahun 2019 (thn n+1)** |  |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 1 | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | - | Kenaikan/Penurunan pendapatan dibagi pendapatan tahun lalu | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 91,34% | 95% | 95% |  |
| 2 | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | - | Kenaikan/Penurunan pendapatan dibagi pendapatan tahun lalu | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 98,75% | 95% | 95% |  |
| 3 | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | - | Kenaikan/Penurunan pendapatan dibagi pendapatan tahun lalu | - | - | 100% | 90% | - | - | 95% | 95% |  |
| 4 | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | - | Kenaikan/Penurunan pendapatan dibagi pendapatan tahun lalu | 80% | 90% | 90% | 90% | 95% | - | 95% | 95% |  |
| 5 | **Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat Perdesaan** | - | Kenaikan/Penurunan pendapatan dibagi pendapatan tahun lalu | 95% | 90% | 90% | 90% | 95% | 97,5% | 95% | 95% |  |
| 6 | **Program Pengembangan Lembaga ekonomi Perdesaan** | - | Kenaikan/Penurunan pendapatan dibagi pendapatan tahun lalu | 85% | 95% | 95% | 90% | 98% | 94,29% | 95% | 95% |  |
| 7 | **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa** | - | Kenaikan/Penurunan pendapatan dibagi pendapatan tahun lalu | 85% | 100% | 100% | 90% | 98% | 99,81% | 95% | 95% |  |
| 8 | **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa** | - | Kenaikan/Penurunan pendapatan dibagi pendapatan tahun lalu | 80% | 95% | 95% | 90% | 95% | 97,88% | 95% | 95% |  |
| 9 | **Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan** | - | Kenaikan/Penurunan pendapatan dibagi pendapatan tahun lalu | 85% | 90% | 90% | 90% | 95% | - | 95% | 95% |  |

* 1. **ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

Adapun yang menjadi permasalah dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD yaitu

1. Ketersediaan anggaran belum memadai;
2. Ketersediaan data profil desa yang belum memadai/belum lengkap;
3. Belum adanya pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa;
4. Fasilitasi permodalan bagi usaha-usaha mikro kecil dan menengah desa serta pelatihan pengelolaan usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan
   1. **RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018**

Rencana Kerja Dinas PMD Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Rancangan Awal RKPD** | | | | | **Hasil Analisis Kebutuhan** | | | | | **Catatan Penting** |
|  | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target capaian** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Kebutuhan Dana (Rp)** |  |
| **1** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  | **Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran** | **90** | **1.258.700.000** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  | **Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran** | **90** | **1.258.700.000** |  |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dinas PMD | Jumlah Materai (lbr) | 1400 | 6.600.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dinas PMD | Jumlah Materai (lbr) | 1400 | 6.600.000 |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik | Dinas PMD | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bln) | 12 | 55.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik | Dinas PMD | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bln) | 12 | 55.000.000 |  |
|  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | Dinas PMD | Cakupan jumlah kendaraan dinas yang memiliki STNK dan Lunas pajak (unit) | 38 | 25.000.000 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | Dinas PMD | Cakupan jumlah kendaraan dinas yang memiliki STNK dan Lunas pajak (unit) | 38 | 25.000.000 |  |
|  | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Dinas PMD | Cakupan jumlah tenaga pengelola keuangan dan tenaga honor (org) | 23 | 300.000.000 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Dinas PMD | Cakupan jumlah tenaga pengelola keuangan dan tenaga honor (org) | 23 | 300.000.000 |  |
|  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Dinas PMD | Cakupan jumlah tenaga kebersihan kantor (org) | 2 | 36.000.000 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Dinas PMD | Cakupan jumlah tenaga kebersihan kantor (org) | 2 | 36.000.000 |  |
|  | Penyediaan alat tulis kantor | Dinas PMD | Cakupan jenis ATK (jenis) | 71 | 61.000.000 | Penyediaan alat tulis kantor | Dinas PMD | Cakupan jenis ATK (jenis) | 71 | 61.000.000 |  |
|  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Dinas PMD | Cakupan jumlah barang cetakan dan penggandaan (lbr) | 51000 | 24.400.000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Dinas PMD | Cakupan jumlah barang cetakan dan penggandaan (lbr) | 51000 | 24.400.000 |  |
|  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Dinas PMD | Cakupan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (jenis) | 10 | 20.000.000 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Dinas PMD | Cakupan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (jenis) | 10 | 20.000.000 |  |
|  | Penyediaan peralatan rumah tangga | Dinas PMD | Cakupan jumlah peralatan rumah tangga (jenis) | 6 | 5.000.000 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Dinas PMD | Cakupan jumlah peralatan rumah tangga (jenis) | 6 | 5.000.000 |  |
|  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | BPMD,PP & KB | Cakupan jumlah bahan bacaan SKH (SKH) | 5 | 7.000.000 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | BPMD,PP & KB | Cakupan jumlah bahan bacaan SKH (SKH) | 5 | 7.000.000 |  |
|  | Penyediaan Makanan dan minuman | Dinas PMD | Cakupan jumlah makanan dan minuman (dos) | 2500 | 43.000.000 | Penyediaan Makanan dan minuman | Dinas PMD | Cakupan jumlah makanan dan minuman (dos) | 2500 | 43.000.000 |  |
|  | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Dinas PMD | Cakupan jumlah rapat rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah (kali) | 80 | 675.700.000 | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Dinas PMD | Cakupan jumlah rapat rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah (kali) | 80 | 675.700.000 |  |
| 2 | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  | **Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **90** | **642.000.000** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  | **Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **90** | **642.000.000** |  |
|  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Dinas PMD | Cakupan jumlah perlengkapan gedung kantor (unit) | 59 | 150.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Dinas PMD | Cakupan jumlah perlengkapan gedung kantor (unit) | 59 | 150.000.000 |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor | Dinas PMD | Terpeliharanya gedung kantor (bln) | 12 | 15.000.000 | Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor | Dinas PMD | Terpeliharanya gedung kantor (bln) | 12 | 15.000.000 |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Dinas PMD | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (unit) | 10 | 55.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional |  | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (unit) | 10 | 55.000.000 |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor | Dinas PMD | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (unit) | 15 | 12.000.000 | Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor | Dinas PMD | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (unit) | 15 | 12.000.000 |  |
|  | Rehabilitasi rehab sedang/berat gedung kantor | Dinas PMD | Terlaksananya rehabilitasi berat bangunan kantor (hari) | 60 | 200.000.000 | Rehabilitasi rehab sedang/berat gedung kantor | Dinas PMD | Terlaksananya rehabilitasi berat bangunan kantor (hari) | 60 | 200.000.000 |  |
|  | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Dinas PMD | Cakupan jumlah peralatan gedung kantor (unit) | 5 | 150.000.000 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Dinas PMD | Cakupan jumlah peralatan gedung kantor (unit) | 5 | 150.000.000 |  |
|  | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Dinas PMD | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang (unit) | 4 | 60.000.000 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Dinas PMD | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang (unit) | 4 | 60.000.000 |  |
| 3 | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** |  | **Tingkat Kepatuhan Aparatur** | **90** | **115.000.000** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** |  | **Tingkat Kepatuhan Aparatur** | **90** | **115.000.000** |  |
|  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Dinas PMD | Cakupan jumlah pakaian dinas yang tersedia (psg) | 44 | 60.000.000 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Dinas PMD | Cakupan jumlah pakaian dinas yang tersedia (psg) | 44 | 60.000.000 |  |
|  | Pengadaan pakaian Korpri | Dinas PMD | Cakupan jumlah pakaian korpri yang tersedia (psg) | 22 | 30.000.000 | Pengadaan pakaian Korpri | Dinas PMD | Cakupan jumlah pakaian korpri yang tersedia (psg) | 22 | 30.000.000 |  |
|  | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Dinas PMD | Cakupan jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia (psg) | 22 | 25.000.000 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Dinas PMD | Cakupan jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia (psg) | 22 | 25.000.000 |  |
|  | Pengadaan mesin/kartu absensi | Dinas PMD | Tersedianya mesin absensi aparatur (Unit) | 0 | - | Pengadaan mesin/kartu absensi | Dinas PMD | Tersedianya mesin absensi aparatur (Unit) | 0 | - |  |
| 4 | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** |  | **Cakupan jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, pelatihan dan peningkatan kapasitas lainnya** | **12** | **180.000.000** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** |  | **Cakupan jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, pelatihan dan peningkatan kapasitas lainnya** | **12** | **180.000.000** |  |
|  | Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Dinas PMD | Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan luar daerah (org) | 12 | 180.000.000 | Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Dinas PMD | Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan luar daerah (org) | 12 | 180.000.000 |  |
| 5 | **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan** |  | **Cakupan jumlah desa / kelurahan memiliki profil yang lengkap** | **33** | **1.062.971.600** | **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan** |  | **Cakupan jumlah desa / kelurahan memiliki profil yang lengkap** | **33** | **1.062.971.600** |  |
|  | Penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan | Dinas PMD | Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti perlombaan desa dan kelurahan (desa/kelurahan) | 0 | - | Penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan | Dinas PMD | Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti perlombaan desa dan kelurahan (desa/kelurahan) | 0 | - |  |
|  | Penyusunan profil desa/kelurahan | Dinas PMD | Terlaksananya penyusunan profil desa (desa/kelurahan) | 33 | 762.971.600 | Penyusunan profil desa/kelurahan | Dinas PMD | Terlaksananya penyusunan profil desa (desa/kelurahan) | 33 | 762.971.600 |  |
|  | Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan | Dinas PMD | Cakupan jumlah desa/kelurahan yang memiliki profile desa/kelurahan yang lengkap (desa/kelurahan) | 0 | - | Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan | Dinas PMD | Cakupan jumlah desa/kelurahan yang memiliki profile desa/kelurahan yang lengkap (desa/kelurahan) | 0 | - |  |
|  | Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan | Dinas PMD | Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti perlombaan desa dan kelurahan (Desa/Kelurahan) | 33 | 300.000.000 | Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan | Dinas PMD | Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti perlombaan desa dan kelurahan (Desa/Kelurahan) | 33 | 300.000.000 |  |
| 6 | **Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan** |  | **Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang diberdayakan** | **15** | **255.000.000** | **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan** |  | **Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang diberdayakan** | **15** | **255.000.000** |  |
|  | Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa | Dinas PMD | Terlaksananya pelatihan manajemen BUMDes (org) | 60 | 165.000.000 | Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa | Dinas PMD | Terlaksananya pelatihan manajemen BUMDes (org) | 60 | 165.000.000 |  |
|  | Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil menengah di pedesaan/kelurahan | Dinas PMD | Cakupan jumlah usaha mikro kecil menengah yang difasilitasi dengan pihak swasta (usaha) | 60 | 90.000.000 | Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil menengah di pedesaan/kelurahan | Dinas PMD | Cakupan jumlah usaha mikro kecil menengah yang difasilitasi dengan pihak swasta (usaha) | 60 | 90.000.000 |  |
| 7 | **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa** |  | **Cakupan nilai swadaya murni masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan** |  | **498.100.000** | **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa** |  | **Cakupan nilai swadaya murni masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan** |  | **498.100.000** |  |
|  | Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Dinas PMD | Terlaksananya BBGRM (desa/kelurahan) | 33 | 350.100.000 | Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Dinas PMD | Terlaksananya BBGRM (desa/kelurahan) | 33 | 350.100.000 |  |
|  | Pembinaan kelompok masyarakat dalam membangun desa/kelurahan | Dinas PMD | Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terlatih (org) | 60 | 148.000.000 | Pembinaan kelompok masyarakat dalam membangun desa/kelurahan | Dinas PMD | Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terlatih (org) | 60 | 148.000.000 |  |
|  | Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa | Dinas PMD | Terlaksananya BBGRM 0 desa/kelurahan (Desa/Kel) | 0 | - | Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa | Dinas PMD | Terlaksananya BBGRM 0 desa/kelurahan (Desa/Kel) | 0 | - |  |
|  | Pelatihan Kader Pembangunan Desa | Dinas PMD | Terlaksananya Pelatihan kader pembangunan desa (Org) | 0 | - | Pelatihan Kader Pembangunan Desa | Dinas PMD | Terlaksananya Pelatihan kader pembangunan desa (Org) | 0 | - |  |
| 8 | **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa** |  | **Cakupan jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan, sosialisasi dan peningkatan kapasitas lainnya** |  | 684.500.100 | **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa** |  | **Cakupan jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan, sosialisasi dan peningkatan kapasitas lainnya** |  | **684.500.100** |  |
|  | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa | Dinas PMD | Terlaksananya pelatihan pengelolaan keuangan desa (org) | 70 | 288.000.000 | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa | Dinas PMD | Terlaksananya pelatihan pengelolaan keuangan desa (org) | 70 | 288.000.000 |  |
|  | Tim fasilitasi ADD dan dana desa | Dinas PMD | Terbentuknya tim falisitasi ADD dan dana desa (desa) | 15 | 250.000.000 | Tim fasilitasi ADD dan dana desa | Dinas PMD | Terbentuknya tim falisitasi ADD dan dana desa (desa) | 15 | 250.000.000 |  |
|  | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa | Dinas PMD | Cakupan jumlah aparatur pemerintah desa yang ikut dalam pelatihan manajemen pemerintahan desa (org) | 60 | 146.500.100 | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa | Dinas PMD | Cakupan jumlah aparatur pemerintah desa yang ikut dalam pelatihan manajemen pemerintahan desa (org) | 60 | 146.500.100 |  |
|  | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Dinas PMD | Cakupan jumlah laporan yang dilaporkan (Desa) | 0 | - | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Dinas PMD | Cakupan jumlah laporan yang dilaporkan (Desa) | 0 | - |  |
| 9 | **Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan** |  | **Cakupan jumlah perempuan yang mengikuti peningkatan kapasitas di tingkat desa** |  | **750.500.000** | **Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan** |  | **Cakupan jumlah perempuan yang mengikuti peningkatan kapasitas di tingkat desa** |  | **750.500.000** |  |
|  | Sosialisasi kegiatan PKK | Dinas PMD | Terlaksananya sosialisasi kegiatan PKK (org) | 150 | 150.000.000 | Sosialisasi kegiatan PKK | Dinas PMD | Terlaksananya sosialisasi kegiatan PKK (org) | 150 | 150.000.000 |  |
|  | Kegiatan Lomba PKK | Dinas PMD | Terlaksananya kegiatan lomba PKK (jenis lomba) | 8 | 450.500.000 | Kegiatan Lomba PKK | Dinas PMD | Terlaksananya kegiatan lomba PKK (jenis lomba) | 8 | 450.500.000 |  |
|  | Penunjang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | Dinas PMD | Terlaksananya kegiatan lomba PKK (org) | 0 | - | Penunjang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | Dinas PMD | Terlaksananya kegiatan lomba PKK (org) | 0 | - |  |
|  | Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif | Dinas PMD | Cakupan jumlah peserta pelatihan di bidang usah ekonomi produktif (org) | 70 | 150.000.000 | Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif | Dinas PMD | Cakupan jumlah peserta pelatihan di bidang usah ekonomi produktif (org) | 70 | 150.000.000 |  |
| **JUMLAH** | | | | | **5.446.771.700** | **JUMLAH** | | | | **5.446.771.700** |  |

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

* 1. **TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja.

* 1. **TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Kotamobagu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pembantu Walikota, mengemban misi dan tugas yang berkaitan langsung dengan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang kesemuannya di laksanakan melalui pendekatan kesejahteraan (Prosperity Approach). Misi tersebut dijabarkan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan tetap mengacu pada Visi Misi Walikota terpilih yaitu :

“**TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DIKAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING”.**

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kota Kotamobagu, pada dasarnya kegiatan Dinas PMD Kota Kotamobagu adalah mengacu pada “*Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, berbudaya dan berdaya saing”.* Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Visi dan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa penetapan tujuan, sasaran, indicator sasaran dan program/kegiatan.

Adapun tujuan dan sasaran dengan misi yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Kotamobagudikaitkan dengan program dan kegiatan yang ada pada tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

* Tujuan :
  + Peningkatan Kapasitas Aparatur di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
  + Peningkatan Pelayanan Administrasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
  + Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Bidang Permbedaryaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
  + Pembinaan Disiplin Aparatur Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
  + Terciptanya Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan
  + Pembinaan tata kelola pemerintahan desa
  + Tersedianya data profil desa/kelurahan
  + Terlaksananya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
  + Terciptanya peningkatan lembaga ekonomi mikro perdesaan yang berdaya saing
* Sasaran :
  + Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur di Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Desa
  + Terwujudnya Pelayanan Administrasi Yang Prima
  + Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Bidang Pelayanan Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Desa
  + Meningkatnya Disiplin Aparatur Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Desa
  + Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di desa
  + Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pemerintahan desa
  + Terlaksananya pendataan dan pelatihan serta tersusunnya dokumen data profil desa/kelurahan se kota kotamobagu
  + Terciptanya Persaingan Dalam Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna di desa
  + Terbentuknya lembaga ekonomi mikro pedesaan
  1. **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah mempunyai tugas membantu Walikota Kotamobagu dalam rangkah pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pembantu Walikota, mengemban misi dan tugas yang berkaitan langsung dengan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang kesemuannya di laksanakan melalui pendekatan kesejahteraan (Prosperity Approach).

Sejalan dengan Visi Kota Kotamobagu tahun 2013-2018 yaitu ***“TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAIKOTA MODEL JASA DIKAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING”***maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Kotamobagu menetapkan Rencana Kerja Tahun 2018 dengan program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
   4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
   5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   11. Penyediaan Makanan dan Minuman
   12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2. ***Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***
   1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
   2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
   3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
   4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
   5. Rehabilitasi rehab sedang/berat gedung kantor
   6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
   7. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
3. ***Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan***
4. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
5. Penyelenggaraan perlombaan desa/kelurahan
6. ***Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun Desa***
   1. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
   2. Pembinaan kelompok masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
   3. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
   4. Pelatihan Kader Pembangunan Desa
7. ***Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa***
   1. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
   2. Tim fasilitasi ADD dan dana desa
   3. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
   4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
   5. Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

**BAB IV**

**P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

**OutputRencana Kerja**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Kotamobagu adalah **Program Tahunan**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Kotamobaguyang sesuai dengan Tujuan dan sasaran Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Kotamobagu.

Rencana Kerja (RENJA) TA. 2018Dinas PMD Kota Kotamobagu selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas PMD Kota Kotamobagu. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas PMD Kota Kotamobagu. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas PMD Kota Kotamobagu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

**Tabel. 4**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program /Kegiatan** | **Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)** | | | | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019** | |
| **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif** | **Sumber Dana** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif** |
| ***1*** | | | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
|  |  |  |  |  |  | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | **Jumlah** | | |  | **5.446.771.700** |  |  | **7.016.448.870** |
|  |  |  |  |  |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran** |  | **90** | **1.258.700.000** |  | 90% | **1.384.570.000** |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai (lbr) | Dinas PMD | 1400 | 6.600.000 | APBD | 90% | 7.260.000 |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bln) | Dinas PMD | 12 | 55.000.000 | APBD | 90% | 60.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | Cakupan jumlah kendaraan dinas yang memiliki STNK dan Lunas pajak (unit) | Dinas PMD | 38 | 25.000.000 | APBD | 90% | 27.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Cakupan jumlah tenaga pengelola keuangan dan tenaga honor (org) | Dinas PMD | 23 | 300.000.000 | APBD | 90% | 330.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Cakupan jumlah tenaga kebersihan kantor (org) | Dinas PMD | 2 | 36.000.000 | APBD | 90% | 39.600.000 |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan alat tulis kantor | Cakupan jenis ATK (jenis) | Dinas PMD | 71 | 61.000.000 | APBD | 90% | 67.100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Cakupan jumlah barang cetakan dan penggandaan (lbr) | Dinas PMD | 51000 | 24.400.000 | APBD | 90% | 26.840.000 |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Cakupan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (jenis) | Dinas PMD | 10 | 20.000.000 | APBD | 90% | 22.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan peralatan rumah tangga | Cakupan jumlah peralatan rumah tangga (jenis) | Dinas PMD | 6 | 5.000.000 | APBD | 90% | 5.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | Cakupan jumlah bahan bacaan SKH (SKH) | Dinas PMD | 5 | 7.000.000 | APBD | 90% | 7.700.000 |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Makanan dan minuman | Cakupan jumlah makanan dan minuman (dos) | Dinas PMD | 2500 | 43.000.000 | APBD | 90% | 47.300.000 |
|  |  |  |  |  |  | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Cakupan jumlah rapat rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah (kali) | Dinas PMD | 80 | 675.700.000 | APBD | 90% | 743.270.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  | **90** | **642.000.000** |  | 90% | **706.200.000** |
|  |  |  |  |  |  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Cakupan jumlah perlengkapan gedung kantor (unit) | Dinas PMD | 59 | 150.000.000 | APBD | 90% | 165.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor (bln) | Dinas PMD | 12 | 15.000.000 | APBD | 90% | 16.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (unit) | Dinas PMD | 10 | 55.000.000 | APBD | 90% | 60.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (unit) | Dinas PMD | 15 | 12.000.000 | APBD | 90% | 13.200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Rehabilitasi rehab sedang/berat gedung kantor | Terlaksananya rehabilitasi berat bangunan kantor (hari) | Dinas PMD | 60 | 200.000.000 | APBD | 90% | 220.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Cakupan jumlah peralatan gedung kantor (unit) | Dinas PMD | 5 | 150.000.000 | APBD | 90% | 165.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang (unit) | Dinas PMD | 4 | 60.000.000 | APBD | 90% | 66.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Tingkat Kepatuhan Aparatur** |  | **90** | **115.000.000** |  | 90% | **126.500.000** |
|  |  |  |  |  |  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Cakupan jumlah pakaian dinas yang tersedia (psg) | Dinas PMD | 44 | 60.000.000 | APBD | 90% | 66.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Pengadaan pakaian Korpri | Cakupan jumlah pakaian korpri yang tersedia (psg) | Dinas PMD | 22 | 30.000.000 | APBD | 90% | 33.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Cakupan jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia (psg) | Dinas PMD | 22 | 25.000.000 | APBD | 90% | 27.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Pengadaan mesin/kartu absensi | Tersedianya mesin absensi aparatur (Unit) | Dinas PMD | 0 | - |  | 0% | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, pelatihan dan peningkatan kapasitas lainnya** |  | **12** | **180.000.000** |  | 90% | **198.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan luar daerah (org) | Dinas PMD | 12 | 180.000.000 | APBD | 90% | 198.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan** | **Cakupan jumlah desa / kelurahan memiliki profil yang lengkap** |  | **33** | **1.062.971.600** |  | 90% | **1.169.268.760** |
|  |  |  |  |  |  | Penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan | Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti perlombaan desa dan kelurahan (desa/kelurahan) | Dinas PMD | 0 | - |  | 0% | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Penyusunan profil desa/kelurahan | Terlaksananya penyusunan profil desa (desa/kelurahan) | Dinas PMD | 33 | 762.971.600 | APBD | 90% | 839.268.760 |
|  |  |  |  |  |  | Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan | Cakupan jumlah desa/kelurahan yang memiliki profile desa/kelurahan yang lengkap (desa/kelurahan) | Dinas PMD | 0 | - |  | 0% | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan | Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti perlombaan desa dan kelurahan (Desa/Kelurahan) | Dinas PMD | 33 | 300.000.000 | APBD | 90% | 330.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan** | **Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang diberdayakan** |  | **15** | **255.000.000** |  | 90% | **280.500.000** |
|  |  |  |  |  |  | Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa | Terlaksananya pelatihan manajemen BUMDes (org) | Dinas PMD | 60 | 165.000.000 | APBD | 90% | 181.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil menengah di pedesaan/kelurahan | Cakupan jumlah usaha mikro kecil menengah yang difasilitasi dengan pihak swasta (usaha) | Dinas PMD | 60 | 90.000.000 | APBD | 90% | 99.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa** | **Cakupan nilai swadaya murni masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan** |  |  | **498.100.000** |  | 90% | **797.910.000** |
|  |  |  |  |  |  | Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Terlaksananya BBGRM (desa/kelurahan) | Dinas PMD | 33 | 350.100.000 | APBD | 90% | 385.110.000 |
|  |  |  |  |  |  | Pembinaan kelompok masyarakat dalam membangun desa/kelurahan | Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terlatih (org) | Dinas PMD | 60 | 148.000.000 | APBD | 90% | 162.800.000 |
|  |  |  |  |  |  | Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa | Terlaksananya BBGRM 0 desa/kelurahan (Desa/Kel) | Dinas PMD | 0 | - |  | 0% | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Pelatihan Kader Pembangunan Desa | Terlaksananya Pelatihan kader pembangunan desa (Org) | Dinas PMD | 0 | - |  | 90% | 250.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa** | **Cakupan jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan, sosialisasi dan peningkatan kapasitas lainnya** |  |  | **684.500.100** |  | 90% | **777.950.110** |
|  |  |  |  |  |  | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa | Terlaksananya pelatihan pengelolaan keuangan desa (org) | Dinas PMD | 70 | 288.000.000 | APBD | 90% | 316.800.000 |
|  |  |  |  |  |  | Tim fasilitasi ADD dan dana desa | Terbentuknya tim falisitasi ADD dan dana desa (desa) | Dinas PMD | 15 | 250.000.000 | APBD | 90% | 275.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa | Cakupan jumlah aparatur pemerintah desa yang ikut dalam pelatihan manajemen pemerintahan desa (org) | Dinas PMD | 60 | 146.500.100 | APBD | 90% | 161.150.110 |
|  |  |  |  |  |  | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Cakupan jumlah laporan yang dilaporkan (Desa) | Dinas PMD | 0 | - |  | 90% | 25.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan** | **Cakupan jumlah perempuan yang mengikuti peningkatan kapasitas di tingkat desa** |  |  | **750.500.000** |  | 90% | **1.575.550.000** |
|  |  |  |  |  |  | Sosialisasi kegiatan PKK | Terlaksananya sosialisasi kegiatan PKK (org) | Dinas PMD | 150 | 150.000.000 | APBD | 90% | 165.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kegiatan Lomba PKK | Terlaksananya kegiatan lomba PKK (jenis lomba) | Dinas PMD | 8 | 450.500.000 | APBD | 90% | 495.550.000 |
|  |  |  |  |  |  | Penunjang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | Terlaksananya kegiatan lomba PKK (org) | Dinas PMD | 0 | - |  | 90% | 750.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif | Cakupan jumlah peserta pelatihan di bidang usah ekonomi produktif (org) | Dinas PMD | 70 | 150.000.000 | APBD | 90% | 165.000.000 |